

Perlindungan Konstitusional Dalam Keolahragaan Melalui Penataan Keolahragaan Yang Bersifat Konstitusional = Constitutional Rights Guarantee On Sports By Sports Arrangement Referring Constitutionally

M. Kemal, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920575035&lokasi=lokal>

Abstrak

Disertasi ini membahas mengenai perlindungan konstitusional dalam keolahragaan. Keberadaan undang-undang yang mengatur tentang keolahragaan nasional berimplikasi pada sejumlah permasalahan konstitusional dalam keolahragaan. Hal ini karena dalam keolahragaan nasional terdapat dua model pengaturan yaitu rezim keolahragaan global dan pengaturan negara. Keberadaan Undang-Undang tentang Keolahragaan diantaranya untuk memberikan perlindungan terhadap pemangku kepentingan olahraga terkait dengan organisasi keolahragaan. Tetapi federasi keolahragaan nasional juga menundukan diri pada pengaturan dari international sports organization. Permasalahan dalam keolahragaan muncul saat terjadi perbedaan kepentingan. Apabila permasalahan tidak terselesaikan masyarakat dalam lingkup keolahragaan atau warga negara yang merupakan unsur konstitutif dari negara dapat dirugikan. Olahraga atau keolahragaan tidak diatur dalam Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permasalahan pokok dalam keolahragaan adalah adanya dua model pengaturan yang berlaku. Selain itu terdapat pemahaman mengenai konsep otonomi dalam hukum keolahragaan yang dinilai meminggirkan peran negara. Penelitian ini menjawab permasalahan, Pertama bagaimana pengaturan keolahragaan nasional di negara yang berdaulat; Kedua, HAM yang mempengaruhi pengaturan keolahragaan serta relasi negara dalam keolahragaan dengan hukum keolahragaan; Ketiga gagasan mengenai Konstitusi Sosial dan relevansinya pada perlindungan konstitusional dalam keolahragaan. Penulisan penelitian ini dengan metodologi yuridis normative dan merupakan penelitian doctrinal. Pada penelitian ini menyimpulkan terdapat kaitan historis dalam relasi keolahragaan nasional dan negara yang tidak sama dengan negara-negara lain terutama di negara Barat. Hubungan antara keolahragaan dan negara Indonesia memiliki kemiripan dengan relasi agama dan negara di Indonesia, yaitu hubungan yang saling membutuhkan dan menguntungkan atau disebut relasi simbiotik. Perkembangan dari sisi yuridis melalui proses legislasi serta putusan MK terkait keolahragaan mempengaruhi hubungan masyarakat dan keolahragaan secara nasional serta negara sehingga memerlukan penataan kembali. Gagasan pemikiran Konstitusi Sosial yaitu menjadikan Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai acuan dalam bermasyarakat menjadi relevan. Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen adalah konstitusi modern yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia yang tergolong lengkap. Dengan demikian penataan Keolahragaan Yang Bersifat Konstitusional atau keolahragaan yang menurut Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kaitan dengan konstitusi untuk jaminan perlindungan konstitusional dalam keolahragaan. Mengatur keolahragaan sebagai materi muatan dalam konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menjadikan lebih tegas dalam memberikan jaminan perlindungan konstitusional dalam keolahragaan.

.....This dissertation discussed on constitutional guarantee on sports. National Sports Act that dealing with national sports has implication in some constitutional issues on sports. In sports there are two models of regulations these are global sports law regime and state law. One of the purposes of National sports Act is to

protect people and sports stakeholder. However, in sports system, the national sports federations also follow and obey the law from their own international organizations. The problems arise while there are some different interest in the national sports especially in national sports federations. Thereof, sports stake holder and mostly the people related to the sports can be affected their rights in the sports if the conflict has no end. People or citizen of the state as the constitutive elements of the state can be disadvantages. The main issue in sports is that the dual model of regulations that has intersection applied in the same situation. The first one is following the main sports organization or sports governing bodies that is privately, and the second is state law. The regulation that comes from the state in many form including the law from the legislation. Besides, in sports law there is concept of autonomy which is understood to minimize or events to ignore the state. While sports is not the subject in national constitution UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. This research to answer the issues on main problem that is discussed, these are, first, to describe and to explain what should sovereign country to regulate its own national sports; second, to describe human rights that affect in sports law and to explain the relation of sports and state in many countries particularly in Indonesia; third, to analyze the idea of Social Constitution and its relevancy with constitutional guarantee in sports. The research using methodology normative legal method with its scope that is doctrinal research by constitutional law, doctrinal sports law, empiric and existing cases. The research views that social constitution which stressed on the respect on human rights, has protective function with the signification of institution as civil society to protect people, and economic function to elevate the economy in society. It has relevancy on sports nationally with their dynamics and development. The research conclude that national sports has its own history related to state and sport relation that quite different from other countries particularly with the west countries. The issues on the conflict of organization and the grey area in regulation need the arrangement with the involvement of the state. The arrangement on national sports referring constitutionally is relevant for constitutional guarantee on sports since the constitution UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 after amendment is a modern constitution that quite complete to arrange on human rights issues and the citizens' rights. By expressing or stating sports directly as subject on constitution is giving more signification on constitutional guarantee on sports.